

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis telah meninjau beberapa penelitian sebelumnya sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi ini. Adapun penelitian yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Arlan (2019) dengan judul **“Efektivitas Program Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ayunan Papan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin”** merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengelolaan BUMDes di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yang disebarakan kepada masyarakat dan pengurus BUMDes untuk menilai tingkat efektivitas dari berbagai aspek, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan BUMDes di Desa Ayunan Papan berada pada kategori cukup efektif, dengan faktor partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan BUMDes. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis, karena sama-sama menyoroti hubungan antara partisipasi masyarakat dan pengelolaan BUMDes, meskipun lokasi dan unit analisisnya berbeda.
2. Suryaningsih (2023) dengan judul **“Pengaruh Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja BUMDesa di Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala”** menunjukkan bahwa partisipasi

masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada masyarakat desa sebagai responden dan dianalisis melalui regresi linier berganda untuk mengukur hubungan antar variabel. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan pengambilan keputusan, maka semakin baik pula kinerja BUMDes dalam mengelola unit usaha desa. Temuan ini mendukung pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan BUMDes, yang sejalan dengan fokus penelitian ini mengenai pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes Berkah Bersama di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Tinjauan Teoritis

1. Partisipasi

Kajian mengenai partisipasi pada dasarnya mengulas bagaimana individu atau kelompok melibatkan diri dalam suatu sistem kolektif. Menurut Ndraha (2015, p. 102), partisipasi secara umum diartikan sebagai manifestasi dari kesadaran dan tanggung jawab sosial individu terhadap komunitasnya, di mana seseorang secara sukarela memosisikan dirinya untuk ikut serta dalam proses mengidentifikasi kebutuhan, memecahkan masalah, serta menggerakkan perubahan di lingkungannya. Dalam perspektif sosiologi pembangunan, konsep partisipasi menuntut adanya pergeseran peran masyarakat yang semula hanya diposisikan sebagai objek pembangunan (penerima manfaat pasif) menjadi subjek

pembangunan yang memegang kendali atas keberlangsungan program lokal (Siagian, 2019, p. 88).

Lebih lanjut, kerangka konseptual yang lebih spesifik dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (1977) yang diadopsi secara luas dalam studi administrasi publik modern. Mereka memandang bahwa partisipasi tidak boleh diartikan secara sempit hanya sebagai sumbangan fisik atau pemenuhan kuota kehadiran dalam sebuah forum administratif, melainkan sebuah proses dinamis yang mencakup keterlibatan mental, emosional, dan operasional dalam seluruh siklus kegiatan, mulai dari penggagasan ide awal hingga tahap penilaian akhir (Cohen & Uphoff dalam Mustanir et al., 2022, p. 59).

Berdasarkan beberapa pandangan ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah wujud keterlibatan aktif masyarakat secara sadar dan sukarela, baik secara mental, emosional, maupun material, dalam suatu ekosistem program pembangunan. Partisipasi bukan sekadar formalitas kehadiran administratif, melainkan sebuah tanggung jawab kolektif yang memberikan ruang bagi individu untuk memengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan demi tercapainya kemaslahatan bersama.

2. Partisipasi Masyarakat (Variabel X)

Dalam konteks pembangunan ekonomi di tingkat perdesaan, dimensi keterlibatan publik diukur secara sistematis menggunakan taksonomi partisipasi menurut Cohen dan Uphoff (dalam Mustanir et al.,

2022, p. 59-60). Dimensi ini membagi partisipasi masyarakat ke dalam empat indikator operasional sebagai berikut:

a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan (Decision Making)

Indikator ini merepresentasikan keterlibatan aktif masyarakat dalam tahapan awal perencanaan pembangunan. Di tingkat desa, bentuk partisipasi ini diwujudkan melalui kehadiran, sumbang saran, gagasan, dan hak suara warga dalam forum resmi seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) maupun Musyawarah Desa (Musdes) khusus. Partisipasi dalam pengambilan keputusan menjadi krusial karena menentukan arah kebijakan strategis, pengidentifikasian masalah bersama, serta penentuan skala prioritas unit usaha yang akan dikembangkan oleh lembaga ekonomi desa (Mustanir et al., 2022, p. 59).

b. Partisipasi dalam Pelaksanaan (Implementation)

Indikator ini mengukur andil nyata masyarakat dalam mengeksekusi program atau mengoperasikan kegiatan yang telah diputuskan bersama. Keterlibatan pada tahap pelaksanaan tidak terbatas pada aspek ketenagakerjaan secara fisik, melainkan mencakup mobilisasi sumber daya lokal secara komprehensif. Aspek ini terwujud dalam bentuk sumbangan pemikiran konstruktif, penyertaan modal atau materi, pembagian keterampilan teknis, hingga kesediaan untuk mengorbankan waktu demi kelancaran operasional kelembagaan di lapangan (Mustanir et al., 2022, p. 59).

c. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat (Benefit Sharing)

Indikator ini menilai sejauh mana program pembangunan mampu memberikan dampak positif secara berkeadilan bagi komunitas lokal. Partisipasi dalam pengambilan manfaat dapat bersifat sektoral maupun komunal, di mana warga desa bertindak sebagai pihak yang menikmati hasil luaran (output) program. Hal ini diukur dari seberapa besar masyarakat memanfaatkan produk atau layanan yang disediakan, terbukanya lapangan kerja baru bagi pengangguran lokal, meningkatnya pendapatan rumah tangga warga, hingga bertambahnya fasilitas publik desa yang didanai dari keuntungan program tersebut (Mustanir et al., 2022, p. 60).

d. Partisipasi dalam Evaluasi (Evaluation)

Indikator ini berkaitan dengan fungsi kontrol sosial publik terhadap jalannya roda organisasi dan implementasi kebijakan. Partisipasi dalam evaluasi menuntut adanya keterlibatan warga dalam mengawasi kinerja para pengelola, mengkritisi kesesuaian antara rencana awal dengan realisasi di lapangan, serta menilai transparansi pengelolaan keuangan organisasi. Melalui iklim evaluasi yang sehat, masyarakat dapat memberikan umpan balik (feedback) berupa kritik, saran, maupun rekomendasi perbaikan demi menjaga akuntabilitas lembaga (Mustanir et al., 2022, p. 60).

Berdasarkan indikator Partisipasi Masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa variabel Partisipasi Masyarakat (X) merupakan sebuah kesatuan siklus keterlibatan warga desa yang tidak dapat

dipisahkan satu sama lain. Pengukuran tingkat partisipasi yang komprehensif harus mencakup kemampuan warga dalam memengaruhi keputusan awal (decision making), andil nyata dalam operasional (implementation), penyerapan dampak positif (benefit sharing), hingga hak menjalankan fungsi kontrol sosial (evaluation). Keempat indikator inilah yang menjadi tolak ukur utama peneliti untuk menilai sejauh mana intensitas keterlibatan warga Desa Kota Raja dalam ekosistem BUMDes Berkah Bersama.

Menurut Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (dalam Mustanir *et al.*, 2022) partisipasi masyarakat dijelaskan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil (manfaat), hingga evaluasi.

3. Pengelolaan (Manajemen)

Pengelolaan atau manajemen merupakan elemen katalis dalam sebuah organisasi yang berfungsi mengintegrasikan berbagai sumber daya demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Handoko (2016, p. 8), pengelolaan diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan alokasi sumber daya manusia, fisik, keuangan, serta informasi organisasi guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam ranah administrasi publik, pengelolaan diarahkan pada minimalisasi pemborosan sumber daya (input) serta optimalisasi dampak kemaslahatan (output) institusi terhadap masyarakat luas (Siagian, 2018, p. 45).

Secara spesifik, dasar manajerial yang paling umum dirujuk dalam tata kelola kelembagaan adalah konsep fungsi manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry. Ia menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (George R. Terry dalam Hasibuan, 2016, p. 15). Keempat fungsi manajemen ini lazim diakronimkan sebagai POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling).

Berdasarkan beberapa pandangan ahli di atas, maka disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian proses manajerial yang sistematis, terstruktur, dan terintegrasi meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan sumber daya organisasi. Keberadaan pengelolaan ini berfungsi sebagai koridor operasional agar seluruh potensi material dan non-material yang dimiliki lembaga dapat digerakkan secara efisien untuk mencapai target kinerja yang akuntabel.

4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara konseptual merupakan entitas ekonomi unik di tingkat desa yang mengawinkan orientasi komersial (profit oriented) dengan orientasi sosial (social oriented). Secara yuridis-formal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes

didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Pasal 1 ayat 1). Regulasi ini menegaskan status BUMDes sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki kewenangan penuh dalam tata kelola hukum keperdataan bisnis.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi perdesaan, Maryunani (2019, p. 74) menjelaskan bahwa BUMDes berfungsi sebagai pilar utama ekonomi desa (center of economic growth) yang bertugas mengonsolidasikan komoditas lokal, membuka lapangan kerja baru, serta memotong jalur distribusi tengkulak yang kerap merugikan petani atau pengrajin kecil. Lebih lanjut, Hidayat (2021, p. 112) mengemukakan bahwa keberadaan BUMDes tidak ditujukan untuk mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) milik warga yang sudah ada, melainkan bertindak sebagai fasilitator, inkubator bisnis, dan agregator pasar yang memberikan nilai tambah bagi ekosistem ekonomi di desa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa BUMDes adalah lembaga ekonomi desa berbadan hukum resmi yang mengemban dua misi sekaligus: mengamankan keuntungan finansial secara mandiri (bisnis) dan memberikan pelayanan sosial demi kesejahteraan publik (agen sosiologis). Sebagai institusi otonom, keberlangsungan hidup BUMDes sangat bergantung pada integrasi regulasi pemerintah desa yang adaptif,

pemanfaatan aset secara produktif, serta kemampuan manajerial pengelola dalam menangkap peluang pasar di tingkat lokal.

5. Pengelolaan BUMDes (Variabel Y)

Efektivitas tata kelola kelembagaan ekonomi desa diukur secara terstruktur menggunakan fungsi-fungsi manajemen universal POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) berdasarkan teori George R. Terry (dalam Hasibuan, 2016, p. 15). Ketika diimplementasikan ke dalam ekosistem Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama, keempat dimensi manajemen tersebut dijabarkan ke dalam indikator operasional sebagai berikut:

a. Perencanaan (Planning) BUMDes

Indikator perencanaan mengukur kemampuan pengelola dalam merumuskan arah kebijakan jangka pendek dan jangka panjang organisasi secara sistematis. Dalam konteks BUMDes, perencanaan mencakup proses penetapan visi-misi lembaga, analisis kelayakan pasar untuk penentuan unit usaha baru, penyusunan Rencana Program Kerja (RPK), serta penganggaran belanja modal. Perencanaan yang efektif harus mampu memetakan potensi sumber daya desa sekaligus memproyeksikan mitigasi risiko terhadap unit-unit usaha yang dikelola (Hasibuan, 2016, p. 15).

b. Pengorganisasian (Organizing) BUMDes

Indikator pengorganisasian menilai struktur formal dan pembagian kerja (job description) dalam internal kelembagaan. Aspek ini diukur dari kejelasan tata hubungan kerja antara penasihat (Kepala Desa),

pengawas, dan pelaksana operasional (Direktur BUMDes beserta jajaran manajer unit). Pengorganisasian yang kuat dicirikan oleh adanya penempatan personel yang sesuai dengan keahliannya (the right man on the right place), serta alokasi tugas yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam operasional enam unit usaha BUMDes (Hasibuan, 2016, p. 15).

c. Pelaksanaan (Actuating) BUMDes

Indikator pelaksanaan memfokuskan pada tindakan nyata untuk menggerakkan dan memotivasi seluruh elemen organisasi agar bekerja secara sinergis menuju pencapaian target. Pada BUMDes Berkah Bersama, pelaksanaan mencakup implementasi harian dari enam unit usaha (seperti layanan BRILink, katering, hingga perikanan), optimalisasi sarana teknologi informasi, pemberian pelayanan publik yang prima, serta kemampuan kepemimpinan pengelola dalam mengeksekusi rencana kerja yang telah disepakati (Hasibuan, 2016, p. 15).

d. Pengawasan (Controlling) BUMDes

Indikator pengawasan mengevaluasi jalannya operasional organisasi guna memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan rencana dan standar baku yang telah ditetapkan. Di tingkat BUMDes, pengawasan mencakup audit laporan keuangan berkala, pemantauan kinerja harian unit usaha guna mencegah terjadinya defisit, serta penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahunan dalam Musyawarah Desa. Pengawasan berfungsi mendeteksi deviasi secara

dini agar tindakan korektif dapat segera diambil (Hasibuan, 2016, p. 15).

Berdasarkan indikator pengelolaan dapat disimpulkan bahwa variabel Pengelolaan BUMDes (Y) merupakan cerminan dari tingkat profesionalisme dan efektivitas manajerial yang dijalankan oleh pengelola. Keberhasilan tata kelola BUMDes tidak dapat dinilai secara parsial, melainkan harus ditinjau dari keutuhan siklus fungsinya: ketepatan perencanaan (planning), kerapian pembagian kerja (organizing), ketangkasan eksekusi di lapangan (actuating), serta ketatnya sistem pengendalian internal (controlling). Keempat dimensi POAC inilah yang digunakan peneliti sebagai parameter untuk mengukur efektivitas tata kelola BUMDes Berkah Bersama di Desa Kota Raja.

6. Hubungan antara Partisipasi Masyarakat dengan Pengelolaan BUMDes

Secara teoritis, hubungan antara variabel Partisipasi Masyarakat (X) dan Pengelolaan BUMDes (Y) merupakan hubungan kausalitas-asosiatif yang bersifat komplementer dalam studi Administrasi Publik dan Pembangunan Desa. BUMDes bukanlah entitas bisnis swasta murni yang bergerak secara independen dari lingkungan sosialnya, melainkan lembaga ekonomi publik yang berbasis pada komunitas lokal (community-based enterprise). Oleh sebab itu, efektivitas fungsi manajemen POAC yang dijalankan oleh internal pengelola BUMDes secara inheren membutuhkan legitimasi dan andil eksternal dari masyarakat perdesaan selaku pemilik modal sosial terbesar.

Korelasi operasional antardimensi kedua variabel ini dapat diuraikan secara logis sebagai berikut:

1. Partisipasi Pengambilan Keputusan menstimulus efektivitas Perencanaan (Planning): Ketika masyarakat terlibat aktif dalam Musdes, aspirasi dan kebutuhan riil akar rumput dapat terakomodasi, sehingga perencanaan unit usaha baru menjadi lebih tepat sasaran dan terhindar dari risiko kegagalan pasar.
2. Partisipasi Pelaksanaan mendukung fungsi Pengorganisasian dan Pelaksanaan (Organizing & Actuating): Ketersediaan masyarakat untuk menjadi mitra usaha, menyumbang pemikiran, atau memanfaatkan keahlian lokal akan memudahkan pengelola dalam memobilisasi sumber daya desa untuk menggerakkan unit usaha produktif.
3. Partisipasi Pengambilan Manfaat mendorong performa Pelaksanaan (Actuating): Tingginya animo warga dalam memanfaatkan produk dan jasa BUMDes secara langsung berimplikasi pada peningkatan omzet, kelancaran likuiditas finansial, dan keberlanjutan unit usaha.
4. Partisipasi Evaluasi memperkuat fungsi Pengawasan (Controlling): Kontrol sosial dari masyarakat luar bertindak sebagai pengawas eksternal yang memaksa pengelola untuk senantiasa menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan, sehingga potensi penyimpangan manajerial (seperti kemacetan dana kredit usaha perikanan) dapat diminimalisasi secara preventif.

Sebaliknya, pengabaian terhadap variabel partisipasi publik akan menciptakan jarak psikologis berupa hilangnya rasa memiliki (sense of

belonging) dari warga, yang berujung pada munculnya sikap apatis, kemacetan operasional, dan kerentanan keberlanjutan institusi. Dengan demikian, penguatan dimensi-dimensi partisipasi masyarakat merupakan determinan penting dalam mengoptimalkan siklus pengelolaan BUMDes demi mewujudkan kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan..

C. Kerangka Pemikiran

Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong keberhasilan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan desa, partisipasi masyarakat tidak hanya berarti keterlibatan dalam bentuk fisik, tetapi juga mencakup peran serta dalam memberikan ide, dukungan moral, serta pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Menurut Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (dalam Mustanir *et al.*, 2022), partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi. Dalam konteks BUMDes, partisipasi masyarakat memiliki peran penting karena keberhasilan pengelolaan BUMDes bergantung pada dukungan dan keterlibatan warga desa.

Sementara itu, pengelolaan menurut George R. Terry (dalam Hasibuan, 2016:15) adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks BUMDes, teori POAC (Planning,

Organizing, Actuating, Controlling) menjadi acuan dalam menilai efektivitas pengelolaan usaha desa yang dijalankan oleh pengurus dan masyarakat.

BUMDes Berkah Bersama Desa Kota Raja berdiri sejak tahun 2022 dan mengelola beberapa unit usaha, yaitu Brilink, katering, perikanan, pengisian air galon, es batu, dan frozen food, dengan total omset sekitar Rp200 juta dalam dua tahun terakhir. Keberhasilan pengelolaan BUMDes tersebut tidak terlepas dari tingkat partisipasi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan usaha. Namun, masih terdapat kendala seperti rendahnya minat masyarakat dan keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan.

Dengan demikian, hubungan antara partisipasi masyarakat (X) dan pengelolaan BUMDes (Y) bersifat saling memengaruhi. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin efektif pula pengelolaan BUMDes yang dilakukan, yang pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan ekonomi dan pembangunan desa.

1. Landasan Teori Variabel X (Partisipasi Masyarakat)

Menurut Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (dalam Mustanir *et al.*, 2022), partisipasi masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator berikut:

- a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan (*Decision Making*) - Keterlibatan masyarakat dalam merencanakan kegiatan, menentukan kebutuhan, dan mengambil keputusan bersama.
- b. Partisipasi dalam Pelaksanaan (*Implementation*) - Keikutsertaan masyarakat dalam menjalankan program, baik berupa tenaga, dana, pikiran, maupun keterampilan.

- c. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat (*Benefit Sharing*) - Masyarakat menikmati dan merasakan manfaat dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.
- d. Partisipasi dalam Evaluasi (*Evaluation*) - Keterlibatan masyarakat dalam menilai, mengawasi, serta memberi masukan terhadap pelaksanaan kegiatan.

2. Landasan Teori Variabel Y (Pengelolaan BUMDes)

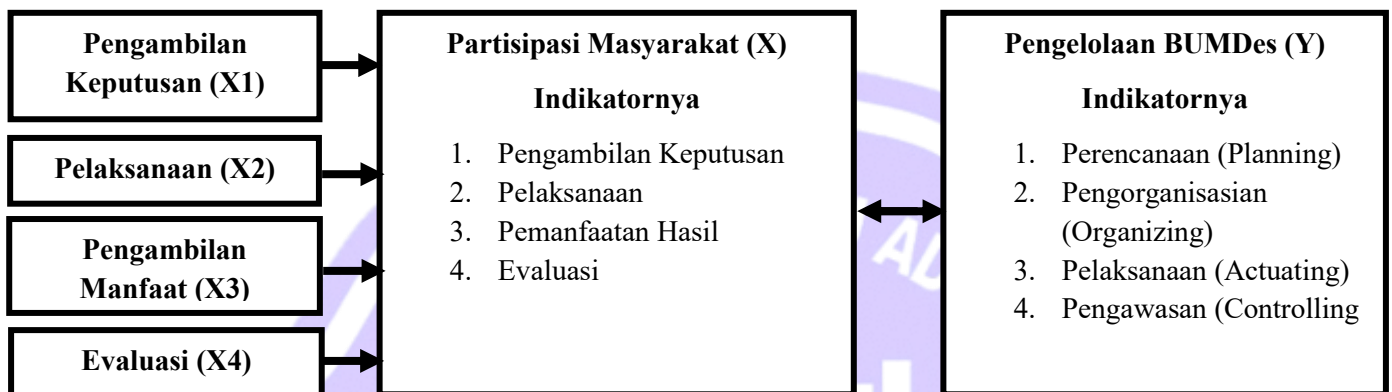
Menurut George R. Terry (dalam Hasibuan, 2016:15), pengelolaan merupakan proses khas manajemen yang mencakup empat fungsi utama, dikenal dengan teori POAC, yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*) — menetapkan tujuan, strategi, dan program kerja BUMDes berdasarkan potensi desa.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) — mengatur struktur organisasi, pembagian tugas, dan hubungan kerja antar pengurus serta masyarakat.
3. Pelaksanaan (*Actuating*) — menggerakkan seluruh sumber daya agar melaksanakan kegiatan usaha sesuai rencana yang telah ditetapkan.
4. Pengawasan (*Controlling*) — memantau, menilai, dan mengevaluasi hasil kerja agar sesuai dengan tujuan dan prinsip transparansi.

Berdasarkan teori variabel X dan variabel Y, dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat merupakan unsur utama dalam pengelolaan BUMDes. Dalam konteks Desa Kota Raja, partisipasi masyarakat menjadi penting karena berhubungan langsung dengan efektivitas pengelolaan BUMDes Berkah Bersama, yang memiliki berbagai unit usaha potensial.

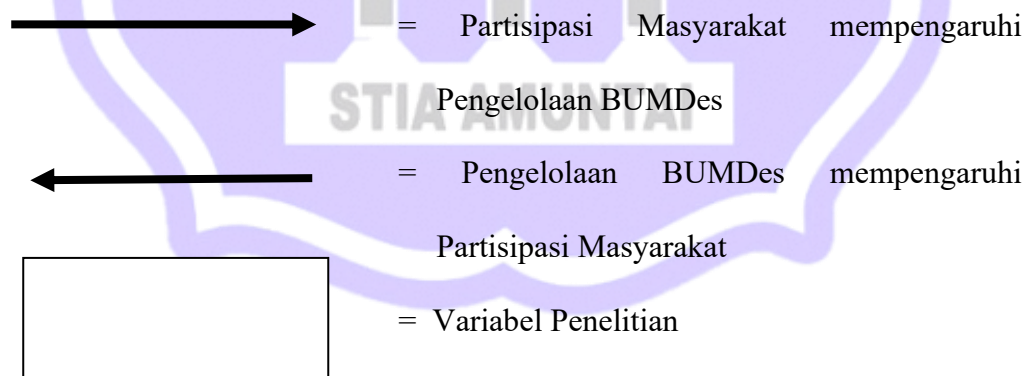
Partisipasi masyarakat yang tinggi diharapkan mampu memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan BUMDes sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi dan pembangunan masyarakat desa secara menyeluruh. Dengan demikian, variabel X (partisipasi masyarakat) berpengaruh langsung terhadap variabel Y (pengelolaan BUMDes).

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BERKAH
BERSAMA DI DESA KOTA RAJA KECAMATAN AMUNTAI SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**



Gambar 2. 1 Kerangka pemikiran

Dari Gambar diatas menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan BUMDes saling mempengaruhi. Adapun keterangan kerangka pemikiran pada gambar 2.1 adalah sebagai berikut:



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya masih perlu dibuktikan melalui proses pengumpulan dan analisis data di lapangan. Perumusan hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada teori, hasil penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya.

1. Hipotesis Alternatif (H_a)

Terdapat pengaruh antara partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes Berkah Bersama di Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Maknanya, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes—baik melalui sumbangan ide, tenaga, keahlian, barang atau dana, maupun keterlibatan dalam pengawasan—maka semakin efektif pula proses pengelolaan BUMDes berdasarkan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

2. Hipotesis Nol (H_0)

Tidak terdapat pengaruh antara partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes Berkah Bersama di Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Artinya, tingkat partisipasi masyarakat tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap efektivitas pengelolaan BUMDes di Desa Kota Raja